

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

UNIT KERJA : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LUHUR RAH PINUJI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 1000101

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 866.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 345 m2/100 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, Rp. 600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 378 m2/60 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 178.000.000
3. Tanah Seluas 186 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, Rp. 88.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 7.000.000

1. MOTOR, SUZUKI SHOGUN Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 22.300.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 35.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 930.300.000

III. HUTANG Rp. 75.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 855.300.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik



Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.